



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO



IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA PERMISAN KECAMATAN JABON

Oleh :

Amelia Juli Fernanda

Dosen Pembimbing :

Isna Fitria Agustina M.Si

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Januari 2025



www.umsida.ac.id



@umsida1912



@umsida1912



universitas
muhammadiyah
sidoarjo



umsida1912

Pendahuluan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh seluruh manusia. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan manfaat sosial, terdapat permintaan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dengan demikian, ketersediaan pangan yang cukup mempunyai dampak yang signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik sosial, politik, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 Tentang Pangan, mengatakan bahwa kebutuhan pangan bagi suatu warga negara merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah.



Kondisi ketahanan pangan yang kuat dapat dibangun salah satunya dengan memahami permasalahan pada ketahanan pangan itu sendiri. Permasalahan ketahanan pangan dapat dilihat dari empat aspek yang saling berkaitan yaitu ketersedian pangan, aksesibilitas pangan, pemanfaatan pangan, serta kerentanan pangan. Keempat aspek ini saling mempengaruhi satu sama lain. Kemiskinan juga salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi kondisi ketahanan pangan. Tinggi rendahnya pendapatan yang dihasilkan oleh setiap individu, akan berpengaruh pada kemampuannya dalam mencukupi kebutuhan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Pendapatan yang rendah juga membatasi pilihan pangan sehingga berdampak pada kualitas gizi dan kesehatan.

Pendahuluan

Tabel 1. Data Rumah Tangga Miskin Desa Permisan Tahun 2022 – 2024

Tahun	Jumlah KK	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Presentase
2022	502	323	64 %
2023	530	315	59 %
2024	538	420	78 %

(Sumber: Diolah Dari Pemerintah Desa Permisan 2024)

Berdasarkan Tabel 1 Desa Permisan memiliki jumlah rumah tangga miskin yang cukup tinggi. Presentase rumah tangga miskin di Desa Permisan sempat menurun pada tahun 2023 sebanyak 5%, namun naik kembali sebesar 19% pada tahun 2024. Permasalahan kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penghasilan masyarakat yang terjadi karena daya beli masyarakat yang menurun [4]. Kategori miskin di Desa Permisan dilihat dari beberapa poin yaitu a) Pekerjaan, b) Luasan tempat tinggalnya, c) Aset yang dimiliki, d) Jumlah tanggungan. Hal ini yang menjadi perhatian adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan serta keterbatasan sumber daya manusia yang layak untuk mengembangkan aktivitas usaha dalam sumber perolehan pendapatan. Untuk mengatasi permasalahan yang ada di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di perdesaan, maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam segala hal. Badan Ketahanan Pangan yang berbasis pendanaan dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Desa menjadi fokus utama program ketahanan pangan itu sendiri.



Pendahuluan

Implementasi ketahanan pangan di Desa Permisan sudah berjalan sejak tahun 2021 sesuai dengan intruksi dari Kemendes. Pemerintah pusat membuat program ketahanan pangan bertujuan untuk pemulihan ekonomi setelah adanya wabah Covid 19 yang mengakibatkan perekonomian di Indonesia menurun, dan Desa Permisan juga merasakan dampak dari adanya wabah Covid 19. Pemerintah memperkenalkan ketahanan pangan pada setiap Desa. Desa Permisan saat ini telah menjalankan program ketahanan pangan dibidang pertanian dan budidaya ikan. Program ketahanan pangan pada bidang budidaya ikan sudah terdapat kolam ikan yang digunakan sebagai budidaya ikan mujair nila dan udang, budidaya tersebut dikelola oleh Pokmas (Kelompok Masyarakat) "Tambak Berkah" sedangkan untuk pertanian dikelola oleh Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) "Tani Makmur". Dari kedua bidang ini sudah mengalami masa panen. Hasil panen tersebut akan dibagikan kepada warga secara gratis karena program ini masih pemula. Bagi para lansia dan yang mempunyai anak yang gizinya kurang akan dibantu oleh Pemerintah Desa supaya bisa memenuhi gizi yang bagus dan sehat dengan memberikan makanan sehat dari hasil ketahanan pangan yang sekarang sudah dijalankan. Meskipun program ketahanan pangan telah dicanangkan, dampak signifikannya belum terlihat secara nyata. Hal ini karena program ini masih tahap pemulaan serta terdapat kendala pada sumber daya manusia.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa telah membuat Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 yang mengacu kepada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 tentang panduan operasional yang mengatur penggunaan Dana Desa dalam konteks ketahanan pangan dan hewani di berbagai wilayah di Indonesia. Fokus utama penggunaan Dana Desa Tahun 2024 berdasarkan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2023 adalah penanganan kemiskinan ekstrem, program ketahanan pangan dan hewani, program pencegahan dan penurunan stunting, program sektor prioritas di Desa melalui bantuan modal BUM Desa/BUM Desa bersama, Program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang APBN yang menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen).



Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vera, N (2021) dengan judul "Implementasi Program Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur". Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur belum berjalan dengan baik karena kondisi Dinas Ketahanan Pangan yang belum maksimal dalam melaksanakan tupoksinya. Penelitian saat ini berbeda dengan penelitian terdahulu dikarenakan penelitian sebelumnya lebih menekankan pada analisis kebijakan dengan penekanan pada kendala yang dihadapi. Sedangkan penelitian saat ini mengkaji pelaksanaan ketahanan pangan di Desa Permisan dan dampaknya terhadap ketahanan pangan lokal.

Kedua pada penelitian yang dilakukan oleh Rio S, dkk (2023) yang berjudul "Implementasi Program Ketahanan Pangan". Temuan penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Ketahanan Pangan Tanaman Padi di Kecamatan Benai masih mengalami permasalahan. Tidak semua petani padi mendapatkan manfaat dari peningkatan komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana. Selanjutnya, sumber daya yang terkait dengan sumber daya manusia dan fasilitas belum dimanfaatkan sepenuhnya. Disposisi dan sikap pelaksana belum optimal, proses pengurangan kebijakan disposisi berjalan lamban. Dan terakhir, adanya struktur birokrasi, yang berarti bahwa petani harus melewati banyak tahapan sebelum dapat melaksanakan rencana mereka di lapangan. Penelitian yang dilakukan saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian saat ini fokus pada pelaksanaan ketahanan pangan lokal di Desa Permisan.

Ketiga pada penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti D (2024) yang berjudul "Implementasi Program Ketahanan Pangan (Studi Kasus Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)". Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Program ketahanan pangan di Desa Tropodo belum berjalan optimal dikarenakan masih ada beberapa kendala yakni pada sumber daya manusia dimana Pemerintah Desa kurang melakukan sosialisasi tentang program ketahanan pangan sehingga masyarakat yang tinggal di sana masih ada yang belum mengetahui adanya program tersebut. Lalu, Pemerintah Desa juga belum mengkomunikasikan antar warga mengenai program ketahanan pangan ini. Penelitian saat ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena menggunakan teori Implementasi yang berbeda.



Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Menggunakan metode kualitatif

Teknik Pengumpulan Data

Observasi, Dokumentasi dan Wawancara

Teknik Analisis Data

Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan (Miles and Huberman)

Teknik Penentuan Informan

Purposive sampling (Ibu Verikah Dwi Windari selaku Kaur Perencanaan, Bapak Mudjito Selaku Kepala Desa Permisan dan Bapak Nastain selaku Ketua Kelompok Tani

Lokasi Penelitian

Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

Sumber Data

Data Primer dan Data Sekunder

Fokus Penelitian

Berfokus pada Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Permisan Kecamatan Jabon ditinjau dari teori Implementasi Menurut Edwards III

Teori

Teori Implementasi Menurut Edwards III, yang terdiri dari empat indikator antara lain (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi



Pendahuluan



Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yakni “Bagaimana Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Permisan Kecamatan Jabon? ”.



Tujuan pada penelitian ini yakni “Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Permisan Kecamatan Jabon dalam meningkatkan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang aman, bergizi, dan cukup bagi seluruh masyarakat.”.



Melalui Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat yaitu dapat dijadikan sebagai penilaian mengenai program ketahanan pangan di Desa Permisan.

Pembahasan

1. Komunikasi

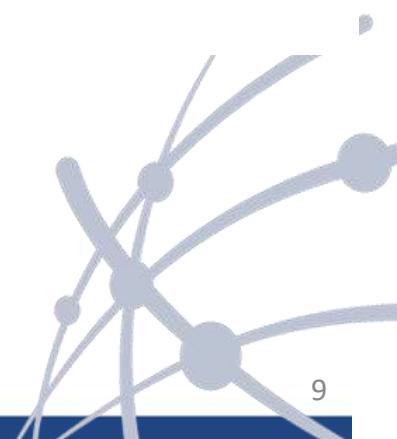
Komunikasi memiliki peran dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Permisan Kecamatan Jabon. Dengan menerapkan komunikasi yang jelas dan mudah dimengerti, serta memberikan pemahaman yang mendalam kepada para pelaksana agar informasi yang disampaikan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Permisan Kecamatan Jabon dalam penyampaian informasi kepada para petani melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) atau sosialisasi. Kegiatan ini mampu memberikan informasi dan wawasan kepada para petani karena penyampaian informasinya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dengan demikian, komunikasi yang efektif dalam program ketahanan pangan ini dapat menjadi kunci dalam mewujudkan keberhasilan program ketahanan pangan. Menurut Edward III, suatu arahan atau perintah dalam melaksanakan kebijakan publik harus jelas dan konsisten. Para pelaksana bisa jadi tidak paham jika instruksinya tidak jelas. Agar pelaksana kebijakan dapat memahami tujuan dan kebijakan secara efektif, diperlukan konsistensi dan kesamaan antara sasaran dan tujuan kebijakan. Maka pada indikator komunikasi ini bisa dikatakan sudah terlaksana dengan baik.



Pembahasan

2. Sumber Daya

Edwards III mengatakan bahwa memiliki sumber daya yang tepat sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif. Adapun jenis sumber daya yang harus dipenuhi dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa permisan yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya sarana prasarana. pada sumber daya manusia yang ada masih kurang mendukung, hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat individualisme yang menyebabkan kurangnya partisipasi aktif. Selain individualisme, faktor usia juga menjadi permasalahan Banyak petani yang sudah lanjut usia dan kurang memiliki akses teknologi modern. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan ini menghambat adaptasi inovasi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas. Maka hal ini belum dapat berjalan dengan baik karena belum ada yang mengendalikan dengan tepat.



Pembahasan

Pemerintah Desa Permisan sudah memaksimalkan penggunaan anggaran ketahanan pangan guna memenuhi permintaan dan kebutuhan para petani untuk menunjang program ketahanan pangan. Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Permisan Kecamatan Jabon pada sumber daya yang ada bisa dikatakan cukup baik, terutama pada sumber daya finansial dan sumber daya sarana prasarana. Namun, terdapat beberapa kekurangan pada sumber daya manusia. Edward III menyebutkan bahwa ketersediaan dan kualitas sumber daya sangat menentukan keberhasilan suatu. Jadi pada indikator sumber daya dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Permisan Kecamatan Jabon belum berjalan dengan baik.

Tabel 2. Anggaran Program Ketahanan Pangan Di Desa Permisan Tahun 2022 - 2024

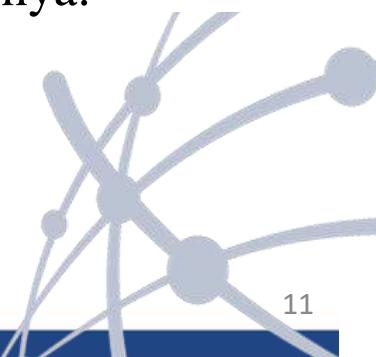
Tahun	Anggaran
2022	Rp. 158.742.000
2023	Rp. 201.183.000
2024	Rp. 169.250.000

(Sumber: Pemerintah Desa Permisan, 2024)

Pembahasan

3. Disposisi

Menurut Edwards III, sikap atau disposisi pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilannya. Sikap pelaksana kebijakan dapat menimbulkan hambatan yang signifikan jika pelaksana kebijakan tidak mematuhi arahan kebijakan yang ditentukan oleh pimpinan. Pada indikator Disposisi dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Permisan belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan manfaat langsung dari program ketahanan pangan bagi masyarakat masih belum terlihat secara signifikan. Hal ini karena program ketahanan pangan di Desa Permisan masih dalam proses. Dibutuhkan waktu lebih lama untuk merasakan manfaatnya, terutama dalam hal peningkatan produksi pangan dan peningkatan pendapatan petani. Selain itu, faktor perubahan iklim juga berpengaruh dalam pelaksanaan program ketahanan pangan ini. Meskipun demikian untuk pelaksanaan tugas-tugasnya tidak ada tumpang tindih. Tidak adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas ini memungkinkan setiap petani/poktan untuk fokus pada kegiatan yang menjadi kewenangannya.



Pembahasan

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu unsur implementasi yang memiliki sifat kompleks dan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat dalam program tersebut. Pada Implementasi program ketahanan pangan di Desa Permisan sangat bergantung pada kekuatan struktur birokrasi yang mendukungnya. Salah satu aspek penting dalam struktur birokrasi adalah Standart Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terukur. Dalam melaksanakan program ketahanan pangan, Desa Permisan mengacu pada PERMENDES PDTT tentang ketahanan pangan. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih terarah. Keberhasilan implementasi program ketahanan pangan juga sangat bergantung pada koordinasi antar stakeholder yang terlibat. Namun, koordinasi antar stakeholder yang terlibat belum berjalan dengan baik, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah pengelolaan data yang belum terpusat. Akibatnya, sulit untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat. Masing-masing pihak masih menyimpan data secara mandiri, sehingga sulit untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program. Jadi pada indikator struktur birokrasi dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Permisan Kecamatan Jabon bisa dikatakan belum terlaksana dengan baik.

Kesimpulan

Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Permisan Kecamatan Jabon dapat disimpulkan yakni: 1) Komunikasi sudah berjalan cukup baik, penyampaian informasi kepada para petani yang dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) atau sosialisasi. 2) Sumber daya, sumber daya manusia belum sepenuhnya berjalan lancar karena banyaknya petani yang sudah berusia lanjut sehingga pengetahuan dan pemahaman mereka terbatas serta masih ada sikap individualisme yang menghambat pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa permisan. Selain sumber daya manusia ada sumber daya finansial, untuk penggunaan anggaran sudah dimaksimalkan dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung kegiatan-kegiatan program ketahanan pangan. Lalu, untuk sumber daya sarana prasarana yang tersedia sudah cukup memadai. 3) Dari segi disposisi belum bisa dikatakan berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari manfaat langsung dari program ketahanan pangan bagi masyarakat belum terlihat secara signifikan. 4) Pada struktur birokrasi, sudah ada SOP yang jelas namun koordinasi antar stakeholder yang terlibat belum berjalan dengan baik.



Referensi

- N. Lamingthon, "Implementasi Program Desa Mandiri Pangan Di Desa Sambirejo Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin," *J. Ilmu Adm. dan Inf.*, vol. 1, no. 1, pp. 27–40, 2012, [Online]. Available:<https://ejournal.stiabpd.ac.id/index.php/junaidi/article/view/5%0A><https://ejournal.stiabpd.ac.id/index.php/junaidi/article/download/5/2>
- Y. Fiandana, M. Makmur, and I. Hanafi, "Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah (Studi pada Kabupaten Malang)," *J. Adm. Publik*, vol. 3, no. 10, pp. 1792–1796, 2020.
- D. J. Tri P, "Implementasi Program Desa Mandiri Pangan Di Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo," *eJournal Univ. Negeri Semarang*, no. 18, pp. 1–9, 2016, [Online]. Available: <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/14053>
- A. B. Encang Saepudin, Ninis Agustini Damayani, "Participation of communities toward the village food independent program in Bandung regency," *Sosiohumaniora - J. Ilmu-ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 20, no. 1, pp. 86–94, 2018.
- PDTT 2022, "Pedoman Program Ketahanan Pangan," Redaksi. [Online]. Available: <https://bakom-darma.metadesa.id/artikel/2023/11/24/pedoman-program-ketahanan-pangan#>
- Tri Susuilo, "Indeks Ketahanan Pangan Global (GFSI) Indonesia," CNBC Indonesia. [Online]. Available: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230126081433-128-408319/soal-ketahanan-pangan-indonesia-berada-di-urutan-69-dunia>
- D. Nurzaman, E. Vestikowati, I. Sujai, U. Galuh, R. Parkir, and D. U. Nomor, "Jalan Umum Dalam Pencapaian Target Retribusi," pp. 2940–2952, 2009.
- Agustino, "Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang," *J. Ilm. Ilmu Adm. Negara*, p. 18, 2016, [Online]. Available: <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/3104>
- Natalia Vera, "Implementasi Program Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur," *J. Ilmu Sos. Polit. dan Pemerintah.*, vol. 9, no. 1, pp. 23–31, 2021, doi: 10.37304/jispar.v9i1.1129.
- R. Setiawan, Z. Rusli, and M. Mayarni, "Implementasi Program Ketahanan Pangan," *FOKUS* Publ. Ilm. untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Univ. Kapuas Sintang, vol. 21, no. 1, 2023, doi: 10.5182/fokus.v21i1.723.
- D. Ariyanti, H. Sukmana, P. Studi, and A. Publik, "Implementasi Ketahanan Pangan (Studi Kasus Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo) [Implementation Of Food Security (Case Study Of Tropodo Village, Krian District, Sidoarjo Regency)]," pp. 1–11, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- R. Daming, M., Agustang, A., Idkhan, A, M., "Implementasi Kebijakan Makassar Recover dalam Penanganan Covid-19 di Kota Makassar," *JISIP (Jurnal Ilmu Sos. dan Pendidikan)*, vol. 5, no. 4, pp. 1475–1481, 2021, doi: 10.36312/jisip.v5i4.2580/http://



THANK YOU

